

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang multikulturalisme dengan beragam etnis dan budaya, kaya akan keanekaragaman budaya, ras, etnis, agama, suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Dengan adanya keberagaman tersebut walaupun berbeda-beda namun tetap satu tujuan, dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Parsudi Suparlan melihat bahwa dalam perspektif tersebut, kebudayaan adalah sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Yang juga harus diperhatikan bersama menyangkut kesamaan pendapat dan kesamaan pemahaman. Hubungan antarmanusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber daya, akan merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan menetapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia.¹

Identitas dapat dipahami sebagai konstruksi sosial. Banyak faktor yang dapat berpengaruh dalam konstruksi identitas, seperti halnya agama, kekuasaan, politik dan lain sebagainya. Pada dasarnya, identitas dapat berubah karena merupakan konstruksi sosial dan penandanya. Konstruksi identitas tentunya terjadi pada berbagai etnis dan komunitas, salah satunya adalah komunitas Mahasiswa Papua. Dalam bentuk identitas ke-Papua-annya di Yogyakarta, Mahasiswa Papua memiliki

¹ Choirul Mahfud. 2016. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal. 76.

beberapa penanda yang cukup jelas, dapat dilihat dari perbedaan jenis rambut, warna kulit, dialek, dan kebiasaan yang dilakukan.

Pada umumnya masyarakat Papua baik mahasiswa maupun bukan, ikut serta dalam komunitas atau aliansi orang Papua yang bersifat kemahasiswaan maupun keagamaan seperti halnya Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Forum Komunikasi Mahasiswa Papua Yogyakarta (FKMPY), Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA), serta Forum Komunikasi Mahasiswa Katolik Papua (FKMKP). Dengan adanya komunitas tersebut Mahasiswa Papua dapat saling mengenal satu sama lain yang dulunya terpisahkan oleh kedaerahan. Dalam kebersamaan organisasi tersebut, Mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lagi menjadi bersuku-suku atau multi-etnik, namun melebur menjadi satu yang berada di bawah identitas ke-Papua-an.

Dari berbagai keberagaman budaya yang ada di Indonesia munculnya ketegangan dan konflik sehingga menjadi kontra produktif bagi penciptaan tatanan kehidupan yang damai, harmoni dan toleran. Adanya konflik ini ditimbulkan karena perbedaan agama, ras, etnis, dan budaya yang dimana tidak dapat menerima adanya perbedaan keberagaman tersebut. Salah satu konflik yang terjadi yaitu di Kota Yogyakarta yang dimana sebagian masyarakat Yogyakarta tidak dapat menerima adanya perbedaan terhadap Mahasiswa Papua yang dimana Mahasiswa Papua dianggap memiliki sifat yang jelek sehingga masyarakat Yogyakarta selalu memandangnya negatif, karena masyarakat Yogyakarta memandang Mahasiswa Papua itu dalam sisi negatifnya saja. Disinilah terbentuk stereotipe masyarakat Yogyakarta terhadap Mahasiswa Papua, karena memiliki keyakinan negatif bahwa

Mahasiswa Papua selalu membuat onar dan meresahkan masyarakat Yogya. kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi yang dimana keadannya tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan dan persatuan serta menyebabkan perpecahan.

Hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat yang majemuk tidak dipungkiri atas banyaknya hal yang potensial bisa menimbulkan adanya konflik sosial. Konflik merupakan sebuah situasi yang dimana tidak dapat dihindari oleh manusia pada umumnya. Konflik itu sendiri dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Salah satu faktor penyebab konflik yang sering terjadi pada negara majemuk seperti Indonesia adalah konflik yang dilatar belakangi oleh unsur persoalan sara (suku, ras, etnis, dan agama). Berdasarkan realita perkembangan sejarah, konsep HAM dimulai pada abad ke-18. Menurut J.C.Holt, dengan menggunakan perspektifnya yang lebih luas menilai kemunculan *Magna Charta*, menjadi kian bertambah matangnya pemikiran serta praktik politik di Eropa yakni konsep tentang kekuasaan berdasarkan hukum dari tuntutan untuk melindungi hak-hak para warga negara di dalam suatu hirarki feodal dan gereja serta dari pola-pola rutin pemerintahan yang berjalan beriringan dengan bentuk-bentuk pemerintah yang lebih disiplin dan canggih.² Tetapi pada kenyataannya kebanyakan orang tidak memperhatikan hal tersebut sehingga masih banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hak-haknya yang memang seharusnya mereka dapatkan. Mahasiswa Papua selalu diperbudak dan mendapatkan diskriminasi dari masyarakat

² Emanuel Gobay. 2018. *Perjuangan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Merupakan Hak Konstitusional Di Indonesia*. Yogyakarta: Best Line Press. Hal. 15-16.

Yogyakarta yang memang masyarakat disana selalu memandang negatif terhadap Mahasiswa Papua. Kondisi tersebut telah menghilangkan kebebasan dan menghapus prinsip kesetaraan warga negara.³

Telah kita ketahui bahwa perbudakan dan diskriminasi sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini. Setiap warga negara tidak mendapatkan kebebasan untuk hidup ataupun kesetaraan antar warga negara lainnya. Hal tersebut telah menimbulkan aksi-aksi protes dari setiap warga negara yang dimana mereka menginginkan keadilan, kebebasan, dan juga kesetaraan. Perbudakan dan diskriminasi bukan hanya dialami oleh bangsa Afrika-Amerika yang berkulit hitam pada masa itu, tetapi adanya diskriminasi yang dialami oleh bangsa Papua atau lebih tepatnya Mahasiswa Papua yang berada di kota Yogyakarta. Mereka disana mendapatkan diskriminasi yang sangat parah sehingga mereka kesulitan mendapatkan tempat tinggal, sulitnya mendapatkan penyewaan sepeda motor, dan sulitnya mendapatkan tempat ibadah. Masyarakat Yogyakarta beranggapan bahwa semua orang Papua selalu membuat keributan seperti mabuk-mabukan dan sulit untuk membayar kos-kosan, sehingga mereka mendapatkan rasis dari masyarakat Yogyakarta.

Rasisme ada ketika sekelompok orang didiskriminasi berdasarkan karakteristik yang dianggap melekat padanya sebagai suatu kelompok. Rasisme sering dikaitkan dengan perbedaan warna kulit, antara penindas dan yang tertindas, tetapi ini bukan sama sekali kondisi yang diperlukan untuk rasisme. Sebagai contoh,

³ Laode Machdani Afala. (2018). *Politik identitas di indonesia*. Malang. Tim UB Press.
https://books.google.co.id/books/about/Politik_Identitas_di_Indonesia.html?id=wUmrtQEACAAJ&redir_esc=y. hal. 5-6.

pada abad ke-19 orang-orang Irlandia adalah korban rasisme di Inggris, meski tidak ada perbedaan warna kulit antara orang-orang Irlandia dengan orang Inggris. Ini adalah contoh kasus rasisme yang tidak didasarkan pada perbedaan warna kulit. Hal ini adalah serangkaian ide dari perbedaan sistematis antara penindas dan yang tertindas, dimana perbedaan fisik yang terlihat adalah bagian yang lebih penting daripada perbedaan itu sendiri.⁴

Pada dasarnya kita sebagai makhluk sosial seharusnya bisa menoleransi atau menerima adanya keberagaman budaya dan agama dari negara lain agar tidak ada rasisme dan diskriminasi terhadap satu kelompok dengan kelompok lainnya. Seperti halnya di Kota Yogyakarta, yang dimana kota Yogya terkenal sebagai kota Istimewa, kota yang nyaman, dan kota pelajar. Tetapi masyarakat disana masih memiliki sifat intoleransi terhadap mahasiswa Papua yang beragama Non-Muslim. adanya stigma-stigma masyarakat Yogyakarta terhadap mahasiswa Papua yang beranggapan bahwa semua mahasiswa Papua memiliki sifat yang jelek. Yang pada akhirnya mahasiswa Papua membentuk sebuah Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) untuk mengadakan suatu aksi yang dimana mahasiswa Papua disini menginginkan hidup damai dan tidak ada lagi intoleransi, diskriminasi dan juga rasis terhadap bangsa Papua. Terbentuknya Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ini rata-rata berstatus mahasiswa dan alumni yang pernah jadi mahasiwa disana dan lebih memilih untuk menetap menjadi penduduk yang mendiami kota Yogyakarta. Jumlah mahasiswa asal Papua di Yogyakarta mencapai ribuan dan setiap tahunnya terus meningkat.

⁴ Kuggy Kayla. 2019. "Rasisme dan Masyarakat Berkelas". *Arah Juang*, 11 September 2019.

Pada tahun 2010 terjadi suatu aksi dari Aliansi Mahasiswa Papua, yang dimana Mahasiswa Papua ini menginginkan adanya suatu kebebasan dan tidak ada lagi suatu diskriminasi yang menyakiti atau meresahkan bangsa / Mahasiswa Papua. Pada tahun 2010 ini lah dimana awal mula adanya perseteruan atau konflik antar mahasiswa Papua dengan masyarakat Yogyakarta. Dan pada tahun 2016 juga terjadi lagi suatu aksi yang kedua kalinya, yang dimana pada tahun ini terjadi suatu rasisme yang sangat parah dari tahun-tahun sebelumnya. Awal mula nya konflik ini terjadi saat sekumpulan mahasiswa Papua berdemo di JL. Kusumanegara meneriakan kebebasan untuk Papua Barat. Aksi klaim kebebasan yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Papua ternyata mendapat respon dari pemerintah dan ormas serta apparatus refresif kepolisian dan TNI di Yogyakarta. Respon atas aksi masyarakat dan mahasiswa Papua itu mengundang dan memicu lahirnya reaksi balik oleh ormas dan pemerintah Yogyakarta terlebih saat Gubernur Hamengku Buwono mengatakan sparatisme harus angkat kaki dari bumi keraton. Bersamaan dengan itu kepolisian dan TNI turun bergandengan tangan dengan ormas lainnya untuk menghalangi aksi yang akan dilakukan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua.

Dalam konflik ini mengakibatkan pengepungan besar-besaran yang dilakukan oleh ormas dan aparat negara melalui kepolisian daerah Yogyakarta di asrama kamasan 1 papua jalan kusumanegara Yogyakarta. Tidak hanya pengepungan namun adanya juga penggrebekan pagar asrama Papua. Adanya beberapa tindakan yang berujung konflik dan kekerasan manifest, kekerasan verbal dan *non* verbal. Konflik tersebut berlangsung selama tiga hari. Dengan adanya

konflik tersebut sangat merugikan mahasiswa Papua khususnya karena mereka sulit untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka kelaparan selama tiga hari karena susah mendapatkan makan karena asrama Papua dijaga sangat ketat, sehingga siapapun tidak ada yang diperbolehkan memberi makanan. Mereka hanya mengandalkan pohon mangga yang ada di dalam asrama Papua tersebut untuk mengisi perutnya agar tidak kelaparan. Adanya diskriminasi seperti itu membuat kota Yogyakarta ini menjadi kota yang asalnya nyaman menjadi tidak nyaman.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yakni Bagaimana terbentuknya stereotipe Masyarakat Yogyakarta Terhadap Mahasiswa Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana terbentuknya stereotipe Masyarakat Yogyakarta Terhadap Mahasiswa Papua?

1.4 Pembatasan Masalah

Dari pembatasan masalah diatas maka penulis membatasi masalah kepada Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Asrama Kamasan 1 yang sulit mencari kos-kosan di Yogyakarta. Dan Pemilik kos-kosan di Jl. Kusumanegara.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah penulis berharap penelitian ini dapat menjadi informasi penting bagi masyarakat umumnya dan penulis khususnya mengenai politik identitas dan terbentuknya stereotipe Masyarakat Yogyakarta terhadap Mahasiswa Papua.